

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggung jawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik saat ini mengalami perkembangan sangat pesat dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah. Akan tetapi terdapat tuntutan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Organisasi sektor publik sendiri saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang ditimbulkannya. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik sendiri memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada kekuasaan publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut (Mardiasmo, 2009).

Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan pengelolaan APBD. Tercapainya pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan APBD yang baik merupakan prinsip *Value For Money* (VFM). Implementasi prinsip *Value For Money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value For Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada lima elemen utama, yaitu:

Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah,

Efisien : pencapaian output yang maksimum dengan input yang rendah atau sebaliknya,

Efektifitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan,

*Equity* : keadilan yang mengacu adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan sosial,

*Equality* : penggunaan uang publik tidak hanya digunakan pada kelompok tertentu, melainkan dilakukan secara merata. *Value For Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang maksimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009).

Pengelolaan APBD sendiri tidak lepas dari akuntabilitas publik, transparansi publik, serta pertanggung jawaban publik. Wujud akuntabilitas publik, transparansi publik dan pertanggung jawaban pengelolaan APBD dalam pelayanan masyarakat adalah dibuatnya laporan pertanggung jawaban. Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan APBD adalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya pengelolaan APBD yang baik (*Good Financial Governance*).

Tercapainya pengelolaan APBD yang baik tidak terlepas dari adanya partisipasi publik dan pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagai pengguna anggaran dan pengawasan secara tidak langsung terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran (APBD). Pengawasan APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, *equity*, dan *equality*. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD saat ini adalah menguatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan responsif serta berlakunya Undang - undang No 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan

pertimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo,2009). *Governmental Accounting Standars Board (GASB, 1999)* dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Mardiasmo, 2009).

Fenomena pengelolaan APBD ini terlihat bahwa informasi penyelenggaraan pemerintah terkait dengan pengelolaan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Semua badan publik tidak memberikan disposisi secara tertulis soal dokumen soal rencana kerja atau rencana anggaran pada dinas/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fenomena sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan dengan standar akuntansi pemerintah, terhadap pengelolaan APBD kota Bandar Lampung adalah : perlu dibatalkan nya rencana pembangunan flyover di Jalan Sultan Agung. Sebab, anggarannya sangat besar, Sementara kebutuhan flayover di wilayah setempat kurang penting. “Dari pada uangnya dibangun flyover, lebih baik dibangun infrastruktur lainnya. Seperti jalan-jalan yang rusak diperbaiki, kan masih banyak di Bandar lampung infrastruktur yang musti dibenahi,” karena beberapa tahun mendatang kereta api baba ranjang, yang menjadi penyebab utama kemacetan di wilayah setempat tidak akan melintasi jalan kota lagi. Sehingga pembangunan flyover dijalan Sultan Agung hanya dianggap pemborosan anggaran saja. ([www.harianmomentum.com](http://www.harianmomentum.com))

Ditambah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi rencanakan jalur *longcut* Tigeneneng-Tarahan. pembangunan *longcut* akan dilakukan dari stasiun wilayah Tigeneneng menuju ke Tarahan. Kereta barang yang biasa melintas di Kota Bandar Lampung menyebabkan kemacetan hingga 20 menit di beberapa titik karena banyaknya gerbong setiap melintas. pembangunan akan selesai pada tahun 2022. ([www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)) Berdasarkan fenomena diatas menggambarkan pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah), pelaksanaan anggaran yang buruk, pemborosan anggaran atau anggaran yang tidak hemat, serta tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah .

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Septi Mayasari (2017) Pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan apbd dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderat pada pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel X yaitu Partisipasi Publik dan mengganti studi kasus yaitu pada OPD di Kota Bandar Lampung. Penambahan variabel mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rosy Oktasary (2016) pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD kabupaten karanganyar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI PUBLIK PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERAT PADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG“**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sample Pengelolaan APBD di Kota Bandar Lampung.
2. Penelitian ini hanya meneliti variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan apbd dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderat pada pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan APBD ?
2. Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap pengelolaan APBD ?
3. Apakah Partisipasi Publik berpengaruh terhadap Pengelolaan APBD?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD ?
5. Apakah standar akuntansi pemerintahan dapat memoderisasi akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD ?
6. Apakah standar akuntansi pemerintahan dapat memoderisasi transparansi publik terhadap pengelolaan APBD ?
7. Apakah standar akuntansi pemerintahan dapat memoderisasi partisipasi publik terhadap pengelolaan APBD ?
8. Apakah standar akuntansi pemerintahan dapat memoderisasi pengawasan terhadap pengelolaan APBD ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan APBD.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi publik terhadap pengelolaan APBD.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan APBD.
5. Untuk membuktikan secara empiris standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderat dapat memoderisasi akuntabilitas publik terhadap pengelolaan APBD.
6. Untuk membuktikan secara empiris standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderat dapat memoderisasi transparansi publik terhadap pengelolaan APBD.
7. Untuk membuktikan secara empiris standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderat dapat memoderisasi partisipasi publik terhadap pengelolaan APBD.
8. Untuk membuktikan secara empiris standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderat dapat memoderisasi pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penulis Melalui penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu akuntansi sektor publik yang telah diperoleh selama kuliah di Institut Informatika & Bisnis Darmajaya ke dalam lembaga Pemerintah Daerah yang sesungguhnya. Selain itu, untuk mengetahui pencapaian akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan dalam rangka pengelolaan APBD dan hubungannya dengan keberhasilan dinas dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bagi Lembaga Pemerintah Untuk memberikan masukan yang berarti bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai fungsi budgeting tentang penggunaan anggaran berdasar *value for money*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada khususnya dan bidang ilmu akuntansi sektor publik pada umumnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variable penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saransaran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**